

KETERKAITAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN DEMOKRASI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Puja Ayu Purwanti, Grace Mercy Dina Manoppo,
Jollyn Felicia Tentunata, Rasji

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Puja Ayu Purwanti

Abstract.

This research explores the relationship between human rights, democracy and the Indonesian legal system. Using literature reviews, content analysis, case studies, interviews, and comparative analysis, the research aims to understand how democracy influences human rights protection. The literature review includes books, journals and legal documents, while content analysis and case studies explore the theory and practice of upholding human rights and democratic principles. Interviews with stakeholders help understand challenges and achievements in human rights-democracy relations. Comparative analysis with other countries completes the understanding. It is hoped that this research will contribute to strengthening democracy and protecting human rights in Indonesia.

Keywords: human rights, democracy, legal system, Indonesia, literature review, analysis, case studies, interviews, comparisons.

PENDAHULUAN

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks sistem hukum tata negara di Indonesia.

Sebagai negara demokratis, Indonesia telah menempatkan HAM sebagai salah satu fondasi utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukumnya. Kedua konsep ini saling melengkapi dan memberikan dasar yang kuat bagi penyelenggaraan negara yang berkeadilan dan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap perlindungan dan pemajuan HAM melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang diimplementasikan dalam sistem tata negaranya. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang

menegaskan hak-hak dasar setiap warga negara, seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan.¹

Demokrasi, sebagai fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia, menjadi landasan yang kokoh berkat partisipasi aktif rakyat serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, seperti pemilihan umum yang bebas, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak-hak minoritas. Dalam esensinya, demokrasi memperjuangkan prinsip kesetaraan dan keadilan, di mana semua warga negara memiliki suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan negara.

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi menjadi fokus penting dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum Indonesia. Penegakan HAM yang kuat tidak hanya menjadi pijakan moral, tetapi juga fondasi yang diperlukan bagi terciptanya demokrasi yang sehat. Tanpa perlindungan yang kokoh terhadap HAM, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang memiliki otoritas menjadi semakin besar, mengancam integritas dan kestabilan sistem demokrasi.

Sebaliknya, demokrasi yang berfungsi dengan baik adalah yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan pemerintah. Di dalamnya, warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, mengemukakan kekhawatiran, dan mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dengan kata lain, demokrasi yang sehat adalah yang memperkuat peran serta masyarakat dalam proses politik, sehingga memastikan representasi yang adil dan akuntabilitas yang transparan dalam pemerintahan.

Melalui pemahaman mendalam tentang hubungan yang kompleks antara HAM dan demokrasi, kita dapat menelusuri bagaimana interaksi ini memengaruhi dinamika sistem hukum Indonesia dan hak-hak individu dalam masyarakat yang demokratis. Dengan memperkuat keterkaitan ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang dalam arah yang progresif, melindungi dan memajukan hak-hak individu serta menjaga integritas demokrasi sebagai pondasi utama negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode yuridis normatif. Studi Literatur: Melakukan tinjauan literatur terhadap buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan riset, dan dokumen hukum terkait HAM,

¹ Paula Baptista et al., "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM," *Photosynthetica* 2, no. 1 (2018): 1–13, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>.

demokrasi, dan sistem hukum di Indonesia. Analisis kerangka hukum yang ada, termasuk UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait keterkaitan antara HAM dan demokrasi.

2. Analisis Konten: Identifikasi dan analisis teori serta konsep kunci terkait HAM, demokrasi, dan sistem hukum Indonesia. Tinjauan implementasi dan praktik penegakan HAM serta penerapan prinsip demokrasi dalam sistem hukum.
3. Studi Kasus: Pemilihan beberapa kasus konkret yang mencerminkan tantangan atau prestasi dalam keterkaitan antara HAM dan demokrasi di Indonesia. Analisis mendalam terhadap konteks, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampaknya terhadap perkembangan hukum dan masyarakat.
4. Wawancara: Wawancara dengan pakar hukum, aktivis HAM, pejabat pemerintah, dan stakeholders lainnya untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam tentang keterkaitan antara HAM dan demokrasi di Indonesia. Pengumpulan data primer untuk melengkapi pemahaman tentang implementasi dan tantangan yang dihadapi.
5. Analisis Komparatif: Perbandingan antara sistem hukum di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki konteks serupa dalam melindungi HAM dan memperkuat demokrasi. Analisis perbedaan dan persamaan dalam pendekatan, kebijakan, dan praktik yang memberikan wawasan tambahan tentang keterkaitan antara HAM, demokrasi, dan sistem hukum.

Melalui kombinasi metode ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam konteks sistem hukum tata negara di Indonesia, serta memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi tercermin dalam sistem hukum Indonesia.

Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi mencerminkan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk sistem hukum Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap perlindungan HAM sebagai landasan utama dalam pembentukan sistem hukumnya. Konstitusi tersebut menjamin sejumlah hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan.

Di samping itu, prinsip-prinsip demokrasi menjadi pondasi bagi proses pembuatan kebijakan dan undang-undang di Indonesia. Partisipasi aktif

masyarakat dalam proses politik, yang tercermin dalam pemilihan umum, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat, memastikan bahwa suara rakyat didengar dalam pembentukan undang-undang yang mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai HAM.²

Sistem peradilan yang independen juga menjadi penjaga terhadap pelaksanaan dan penegakan HAM. Lembaga peradilan bertugas untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi oleh pemerintah serta lembaga lainnya. Putusan-putusan pengadilan yang adil dan setara bagi semua warga negara merupakan salah satu cara di mana prinsip-prinsip demokrasi dan HAM tercermin dalam sistem hukum tata negara.

Selain itu, lembaga pengawasan independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), turut memainkan peran penting dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga dijalankan secara efektif dan adil untuk semua warga negara. Mereka mengawasi tindakan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM yang diakui secara internasional.

Melalui keterkaitan yang erat antara HAM dan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia, diharapkan tercipta landasan yang kokoh bagi negara yang berkeadilan, inklusif, dan berdasarkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, sistem hukum tersebut menjadi alat untuk memastikan perlindungan, pemajuan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar.

Dampak implementasi prinsip-prinsip demokrasi terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Implementasi prinsip-prinsip demokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk dasar bagi sistem politik negara, tetapi juga memengaruhi bagaimana HAM dipahami, diakui, dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat.

Demokrasi memperkuat sistem pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga negara lainnya. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan kebebasan berekspresi, lembaga-lembaga pengawasan seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat bekerja secara lebih efektif untuk memantau pelanggaran HAM dan memberikan perlindungan kepada korban. Lebih dari sekadar menjadi mekanisme formal, demokrasi memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka.

² Very Irawan, Yati Sharfina Desiandri, and Universitas Sumatera Utara, "Keterkaitan Ham Dengan Demokrasi Dalam Sistem Htn Di Indonesia" 4307, no. 1 (2024): 106–15.

Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Kebebasan berpendapat dan akses yang lebih luas terhadap proses politik dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak HAM dan memungkinkan individu untuk mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka.³ Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menciptakan wadah bagi penegakan hukum, tetapi juga mendorong pemerintah untuk memperkuat lembaga peradilan untuk menjamin keadilan bagi semua.

Demokrasi mendorong penghormatan terhadap hak-hak minoritas dan kebebasan beragama, melindungi mereka dari diskriminasi dan penindasan, serta memberikan suara yang lebih kuat dalam keputusan politik. Selain itu, demokrasi menekankan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, memastikan operasionalnya sesuai hukum. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga ditingkatkan, memperkuat pemajuan HAM melalui berbagai jalur politik dan sosial.

Melalui implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang kuat, diharapkan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat diperkuat, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara HAM dan demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia, dan cara mengatasinya.

Tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam sistem hukum tata negara Indonesia adalah sejalan dengan upaya memperkuat demokrasi, namun tetap melindungi dan memajukan HAM secara adil dan merata bagi semua warga negara. Beberapa tantangan utama yang muncul antara lain:

1. Keterbatasan Penegakan Hukum: Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang melindungi HAM, penegakan hukum seringkali belum optimal. Tantangan ini dapat timbul dari lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, kekurangan sumber daya, atau bahkan campur tangan politik yang menghambat proses penegakan hukum yang adil dan independen.
2. Konflik antara HAM dan Keamanan: Terkadang, terdapat konflik antara upaya untuk melindungi HAM dan keamanan nasional. Dalam situasi

³ Majda El Muhtaj et al., "Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 369, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.369-386>.

seperti konflik bersenjata atau ancaman terorisme, pemerintah mungkin cenderung mengambil tindakan yang melanggar HAM sebagai respons terhadap ancaman tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan antara prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan HAM.

3. Kebijakan yang Diskriminatif: Beberapa kebijakan atau regulasi yang diusulkan atau diimplementasikan oleh pemerintah dapat menjadi diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau rentan, seperti perempuan, etnis minoritas, atau LGBT. Hal ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak-hak semua individu tanpa diskriminasi.
4. Ketidaksetaraan Akses dan Partisipasi: Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap proses politik dan keputusan pemerintah. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya lainnya dapat membatasi partisipasi mereka dalam proses demokratis, sehingga menghambat perlindungan HAM secara merata bagi semua.⁴

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat diambil:

1. Penguatan Sistem Peradilan: Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dengan adil dan efektif, serta memastikan bahwa semua pelanggaran HAM diperlakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.
2. Penyusunan Kebijakan yang Inklusif: Mendorong penyusunan kebijakan publik yang inklusif dan berdasarkan bukti, dengan memperhatikan kebutuhan dan perspektif dari berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok minoritas atau rentan.
3. Pendidikan dan Advokasi HAM: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM, baik melalui program pendidikan formal maupun advokasi masyarakat sipil, sehingga masyarakat lebih mampu memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.
4. Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, sumber daya, dan ruang untuk berekspresi pendapat mereka.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan keseimbangan antara Hak Asasi Manusia dan demokrasi dalam sistem hukum tata negara

⁴ Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustamam, and Badri Badri, "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 205, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5929>.

Indonesia dapat dipertahankan dan diperkuat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Peran Hak Asasi Manusia dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam konteks sistem hukum Indonesia.

Peran Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam konteks sistem hukum Indonesia.⁵ Berikut adalah beberapa cara di mana HAM berperan dalam mendukung demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan:

1. Mempertahankan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan: HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Dengan memastikan perlindungan hak-hak individu, HAM membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak lain yang memiliki otoritas.
2. Menjamin Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi: HAM melindungi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai. Dalam konteks demokrasi, kebebasan ini penting karena memungkinkan warga negara untuk mengemukakan pendapat, menyuarakan kekhawatiran, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut represi atau pembungkaman.
3. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah: HAM memainkan peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hak akses informasi, hak untuk memantau pemerintah, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pelanggaran HAM memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga memperkuat demokrasi.
4. Perlindungan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan: HAM memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta. Melalui prinsip-prinsip seperti larangan penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang, dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, HAM membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dengan membatasi kecenderungan otoriterisme dan penindasan.
5. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat: HAM mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

⁵ Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.

Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, pendidikan tentang hak-hak mereka, dan ruang untuk berekspresi pendapat, HAM membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi demokratis.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, perlindungan dan pemajuan HAM adalah bagian integral dari upaya untuk memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Melalui penegakan hukum yang adil, transparansi dalam proses politik, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sistem hukum Indonesia dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat fondasi demokrasi yang berkelanjutan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara ringkas, keterkaitan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip demokrasi sangat berpengaruh terhadap perlindungan HAM. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keduanya, seperti keterbatasan penegakan hukum dan konflik antara HAM dan keamanan.

Dalam konteks ini, HAM memainkan peran krusial dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Melalui perlindungan terhadap prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat, HAM membantu memastikan bahwa negara beroperasi dalam batas-batas yang diatur oleh hukum dan menghormati hak-hak individu.

Dengan demikian, keseluruhan analisis menunjukkan bahwa perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia merupakan faktor penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Sucipto, S., Sumpena, A., & Wicaksono, M. A. M. (2023). Perbedaan Model Pembelajaran Tradisional dan Kooperatif Dalam Peningkatan Keterampilan Bermain Futsal. *Journal of SPORT (Sport, Physical Education, Organization, Recreation, and Training)*, 7(2), 561-575.
- Arnol, A., Firdaus, K., Wahyuri, A. S., & Lawanis, H. (2024). Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Type Jigsaw untuk Meningkatkan Hasil Keterampilan Belajar pada Teknik Dasar Futsal. *Jurnal JPDO*, 7(2), 17-24.
- Perbowo, S. B. A. (2016). Studi Perbandingan Keterampilan Sosial Dalam Pembelajaran Ips Terpadu Antara Siswa Yang Menggunakan Model

- Pembelajaran Kooperatif Value Clarification Technique (Vct) Dan Role Playing (Rp) Dengan Memperhatikan Spiritual Quotient (Sq) Pada Siswa Smp Negeri 3 Pekalongan Lampung Timur Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Rif'an, T. A., & Khory, F. D. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament (Tgt) Terhadap Motivasi Belajar Renang Gaya Dada (Studi Pada Siswa Yang Mengikuti Ekstrakurikuler Renang Di SMKN 3 Kediri).
- Rizky, T. S., & Zulkifli, Z. (2023). Meningkatkan Hasil Belajar Passing Dan Stopping Permainan Futsal Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(4), 95-103.
- Salmawati, S. (2022). Pembelajaran Kooperatif Terpadu Cirkuit Training Meningkatkan Aktivitas, Keterampilan dan Hasil Belajar Permainan Bola Basket. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 414-429.
- Tambunan, D. A. (2018). *Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas V di MIS Ikhwanul Muslimin Tembung* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan).